

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Muri Yusuf, *Metode Penelitaian Kualitatif, Kantitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017)
- Bahder, Johan Nasution. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Cet 2. (Jakarta: PT Rineka Cipta. 2013)
- Cekli Setya Pratiwi, *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2016),
- Fatkhurohman, Sirajuddin. *Peran Negara dan Rakyat dalam Menanggulangi dan Mencegah Pandemi Covid 19*. Conference on Innovation and Application of Science and Technology, (Malang: Universitas Widyagama, 2020)
- Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. (Jakarta: Balai Pustaka. 2004)
- Hotma P. Sibuea. *Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, (Jakarta: Erlangga. 2002)
- Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. (Jakarta: Erlangga, 2011)
- Ichsan Syuhudi, *‘Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. (Jakarta: Erlangga, 2017)
- Iqbal Muhammad, *Fiqh SiyasahKontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2017)
- I Made Laut Mertha Jaya, *Metodologi Penelitaian Kualitatif Dan kuantitatif Teori,penerapan dan riset nyata* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020),
- Ibrohim, *Metodologi Penelitian Kualitatif: panduan penelitian beserta contoh*

*proposal Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2020)

Jazim Hamidi, *Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) Di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti. 1999) Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Maxi Rein Rondunuwu, *Buku Saku Tanya Jawab Seputar Vaksinasi Covid-1*, (Jakarta: Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2019)

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014)

M.Rifaldi, *Pandemi Virus Corona*, (Yayasan Sahabat Alam Raflesia, Bengkulu. 2021)

Mulyadi, *Implemetasi Kebijakan*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2015)

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: PT Raja Grafindo. 2016)

Nurdin Usman, *Koneks Implementasi Berbasis Kurikulum*. (Jakarta: Grasindo, 2002)

Ruspendi, *Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Dunia Usaha dan Persaingan Tenaga Kerja*, (Tangerang: Universitas Pamulang, 2021), 53.

Sandu Siyoto Dan M. Ali Sodik, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta; Literasi Media Publishing, 2015)

## **Jurnal**

Armanto Makmum, dan Siti Fadhilah Hazhiyah, (2020). “Tinjauan Terkait Pengembangan Vaksin Covid-19”. *Jurnal Moluca Medica*, No. 2, Vol. 13

Anika Prastyowati, (2020). “Mengenai Karakteristik Virus SARS-CoV-2 Penyebab Penyakit Covid-19 Sebagaidasar Upaya Untuk Pengembangan Obat Antivirus dan Vaksin”. *Jurnal Bio Trends* No. 1, Vol. 11

Indah Pitaloka Sari, Sriwidodo.(2020). “Perkembangan Teknologi Terkini Dalam Mempercepat Produksi Vaksin Covid-19”. *Majalah Farmasetika*. No.5, Vol 5

Indra Rahmatullah,( 2020 ). “Jaminan Hak Kesehatan Pekerja Work Form Office Selama Masa PSBB Covid-19”. *Jurnal: Buletik Hukum dan Keadilan*, No.1 Vol.4,

Nabilah Apriani dan Ersya Aqila Wafa Azizah. (2022). “Vaksinisasi Covid-19 : Upaya Pemenuhan Hak Kesehatan atau Wujud Kewajiban dalam Berbangsa dan Bernegara”. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*.(6).

Siti Nur Aidah.(2021). “Bacaan Wajib! Vaksin Corona”. *Jurnal KBM Indonesia*. Vol. 110

Oskar Arifandi Ginting,(2021) “Analisis Kebijakan Kewajiban Vaksinasi Covid-19 Oleh Pemerintah Terhadap Setiap Warga Masyarakat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional Warga Negara”. *Jurnal Ilmiah Metadata*. Vol 3. no 2

Riska Agustina,(2021) “Kebijakan Wajib Vaksinansi Covid-19 Ditinjau dari Asas Manfaat, Kepentingan Umum dan Hak Asasi Manusia”, *Indonesia Law Reform Journal*. Vol 1, No.3

### **Undang-Undang**

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) Pasal 13

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 24 Huruf C